

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Keuangan Negara ialah seluruh hak dan kewajiban negara yang ditaksir dengan uang, dan merupakan segala sesuatu yang berwujud uang atau produk yang dapat dijadikan milik negara sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban tersebut (Sugjanto dkk., 1995). Hak-hak negara adalah setiap hak atau usaha yang dilakukan oleh suatu pemerintah untuk mengisi perbendaharaannya. Misalnya, hak suatu pemerintah untuk mengisi perbendaharaannya. Contohnya saja hak untuk mencetak uang serta mengambil pinjaman serta memungut pajak dan denda. Tugas negara ialah tugas pemerintah agar melaksanakan tugas negara, yang tertuang pada RPJP UUD 1945, RPJM dan RKP. UU APBN pada prinsipnya ialah untuk kesejahteraan rakyat serta melayani masyarakat umum dan bertindak sebagai agen pembangunan.

Sektor keuangan negara dapat dikelola oleh pemerintah dan dipisahkan dari dewan manajemen. Pendanaan negara yang dikelola oleh pemerintah pusat adalah komponen keuangan negara, yang memperkirakan seluruh set negara. Sementara dana pemerintah dikelola langsung dari pemerintah daerah, anggaran dan pengeluaran pendapatan di wilayah tersebut di rumah tangga regional dan inventaris daerah terdaftar. Pendanaan negara dipisahkan oleh manajemen. Komponen keuangan negara, yang terpisah satu sama lain dan mengelola metode berdasarkan hukum public atau hukum borjuis. Pembiayaan negara yang terpisah ini mencakup vitamin yang

dapat berupa perusahaan ketenagakerjaan, perusahaan publik, bank pemerintah dan lembaga keuangan pemerintah.

Keterkaitan pada keuangan negara dengan anggaran negara (pemerintah) sangat erat, karena bertambah ataupun berkurangnya keuangan negara ini berdasarkan pelaksanaan anggaran negara, sehingga pengurusan keuangan negara dilaksanakan pada pelaksanaan anggaran negara. Anggaran negara atau anggaran pemerintah yang dimaksud adalah APBN dan APBD. APBN dan APBD merupakan inti dari keuangan (Akuntansi) pemerintah karena anggaran merupakan informasi keuangan paling penting yang dihasilkan pemerintah.

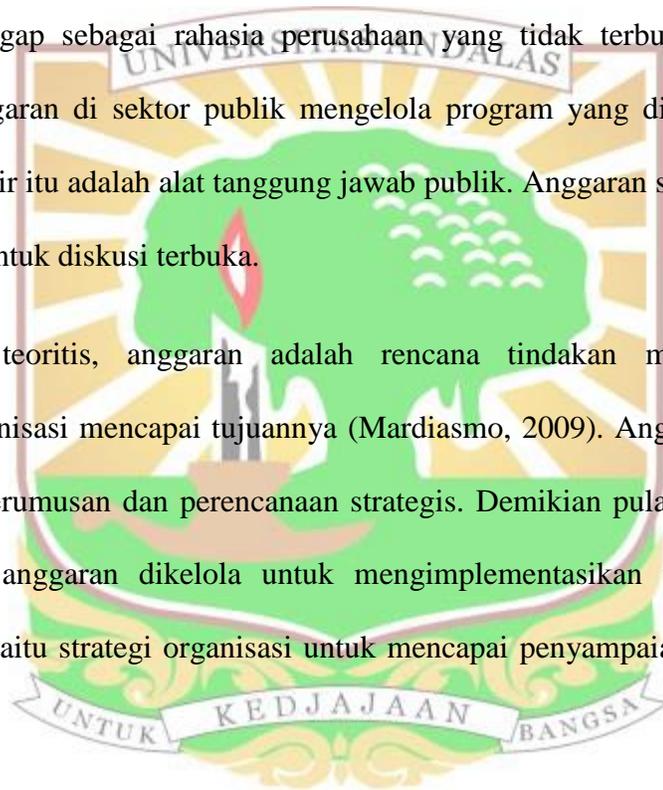
Definisi anggaran dalam arti sempit yaitu anggaran nasional berarti pengeluaran dan pendapatan yang direncanakan untuk tahun tersebut. disisi lain, anggaran nasional berarti periode perencanaan anggaran, lembaga penegak, dan tanggung jawab dalam arti luas. Oleh karena itu, anggaran dalam arti luas mencakup siklus anggaran. Siklus anggaran adalah proses penganggaran berkelanjutan yang dimulai anggaran pihak yang disetujui dari tahap persiapan. Pada tahap pelaksanaan anggaran ini adapun diperlukannya Praktik akuntansi (keuangan) yang mampu menghasilkan sebuah laporan keuangan pemerintah serta pada badan pengawas fungsional.

Anggaran adalah pernyataan kinerja yang diperkirakan telah dicapai selama periode tertentu yang ditunjukkan oleh indikator keuangan (Mardiasmo 2009). Secara lebih spesifik, Halim dan Kusufi (2012) mendefinisikan anggaran sebagaimana didefinisikan oleh Sugijanto et al (1995), yaitu rencana kegiatan yang diwujudkan

dalam bentuk keuangan, termasuk proyeksi pengeluaran yang diharapkan selama periode waktu tertentu. Bagaimana memenuhi pengeluaran tersebut. Dalam konteks otonomi daerah dan desentralisasi, anggaran menempati posisi yang paling penting (Ritonga, 2010a). Sedangkan proses dan cara penyusunan anggaran disebut penganggaran. Di sektor publik, penganggaran merupakan langkah yang sangat kompleks dan bernuansa politik. Berbeda dengan sektor swasta dan korporasi, anggaran dianggap sebagai rahasia perusahaan yang tidak terbuka untuk umum, sedangkan anggaran di sektor publik mengelola program yang didanai publik dan publik, saya pikir itu adalah alat tanggung jawab publik. Anggaran sektor publik akan diberitahukan untuk diskusi terbuka.

Secara teoritis, anggaran adalah rencana tindakan manajemen untuk membantu organisasi mencapai tujuannya (Mardiasmo, 2009). Anggaran merupakan ekspresi dari perumusan dan perencanaan strategis. Demikian pula untuk organisasi sektor publik, anggaran dikelola untuk mengimplementasikan tujuan organisasi sektor publik, yaitu strategi organisasi untuk mencapai penyampaian layanan publik yang unggul

Paradigma pengelolaan keuangan daerah telah mengalami perubahan yang sangat mendasar, terutama pada tahun 2001 dengan diterapkannya otonomi daerah dan desentralisasi keuangan. Penyerapan anggaran ialah termasuk salah satu indikator sebuah penilaian kinerja pada pengelolaan keuangan daerah. Karena itu tergantung pada tingkat penyerapan anggaran. Dapat dilihat gambaran lengkap kinerja yang bertanggungjawab serta melaksanakan tiap kegiatan yang akan direncanakan



(Mardiasmo 2009). Semakin tepat penyerapan anggaran untuk realisasi kegiatan maka akan semakin besar juga dampak terhadap fasilitas umum serta pelayanan publik lainnya yang dirasakan oleh masyarakat. Oleh sebab itu, kota harus fokus pada kegiatan produktif yang digunakan oleh komunitas lain (Fahlevi dan Ananta 2015:38).

APBN adalah rencana keuangan pemerintah selama setahun dan telah disetujui oleh DPR yang memuat daftar rincian sistematis rencana pengeluaran nasional dan sumber pendapatan untuk tahun berjalan dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember (Niwa, 2007).

Coronavirus disease 2019, yang sering kita sebut covid19, merupakan penyakit jenis baru yang menyertai infeksi cepat yang disebabkan oleh virus corona yang pertama kali muncul di kota Wuhan, tepatnya Hubei, China. Virus Covid-19 ini bisa menimbulkan gejala ringan yang bisa dialami siapa saja yang terkena. Tidak ada obat khusus untuk penyembuhannya kecuali memiliki pola hidup sehat. Oleh sebab itu, negara melakukan kebijakan yaitu lockdown agar untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 (Setiati dan Azwar, 2020).

Sejak awal diketahui bahwa infeksi COVID-19 dapat ditularkan dari satu orang ke orang lain melalui berbagai jalur (Sobah, 2020). Merupakan penyakit yang sangat mudah menular dan merupakan jenis yang berisiko tinggi, sehingga tenaga medis yang merawat pasien yang terkena COVID-19 juga rentan terhadap infeksi. Oleh karena itu, karyawan yang kontak langsung dengan petugas kesehatan dan

pasien harus memakai alat pelindung diri saat berhadapan dengan pasien (Theopilus et al, 2020).

Jadi, Pemerintah Indonesia melakukan kebijakan yang merupakan pembatasan sosial besar (PSBB) yang bertujuan untuk memperlambat penyebaran virus Covid-19. Selain kebijakan menjaga jarak fisik minimal satu hingga dua meter dari korban, adapun pemerintah juga mendukung penggunaan APBN sebagai penanganan serta pencegahan Covid-19 (Yunus dan Rezki, 2020).

Menyusul merebaknya pandemi Covid-19 di Indonesia, pemerintah mengambil langkah-langkah untuk menahan penyebaran COVID-19, dan telah menyiapkan anggaran rangkuman kegiatan reinfeksi Indonesia dalam bentuk perintah presiden untuk tahun keempat pemerintahan. Adapun percepatan proses pengadaan barang atau jasa sebagai respon, hal tersebut bisa mempengaruhi realisasi penyerapan terhadap anggaran misalnya biaya tenaga kerja serta belanja barang operasional maupun non operasional dan belanja modal. Laporan penyerapan anggaran ialah salah satu komponen yang ada dalam laporan keuangan suatu instansi pemerintah berupa informasi penyerapan anggaran untuk periode tertentu (Rukayah et al, 2017).

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk membahas realisasi anggaran pendapatan dan belanja yang terjadi pada KPPN Padang saat sekarang ini. Maka penulis mengambil judul **“Analisis EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI REALISASI ANGGARAN BELANJA DI KPPN PADANG PADA**

**MASA PANDEMI COVID-19**”, yang menjadi tempat penelitian adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padang.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana realisasi anggaran belanja di KPPN Padang selama masa pandemi ?
2. Seberapa Efektif dan Efisien Realisasi Anggaran di tahun 2020 disaat pandemi covid-19 ini?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Dari kegiatan penulisan tugas akhir ini penulis dapat mengambil tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan realisasi anggaran sebelum dan pada saat pandemi covid-19 ini ?
2. Untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi realisasi anggaran sebelum dan pada saat pandemi covid-19 ini ?

## **1.4 Manfaat Penulisan**

1. Bagi Penulis
  - a. Mampu mengelola ilmu yang akan diperoleh selama permagangan pada pekerjaan yang nyata setelah lulus dari Universitas Andalas.
  - b. Untuk melatih membandingkan materi yang telah diajarkan saat perkuliahan dengan praktek yang dilaksanakan di KPPN Padang.

- c. Untuk meningkatkan serta menambah wawasan penulis dalam bersosialisasi dilingkungan kerja.
- d. Dapat menambah pengetahuan berfikir penulis pada bidang ilmu yang dilakukan selama kuliah.

2. Bagi Instansi :

Sebagai saran dan kritikan yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan kinerja yang lebih baik.

### 1.5 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh sebuah data serta keterangan yang akan diuji kebenarannya, maka metode yang akan digunakan terdiri dari, sebagai berikut:

1. Studi Perpustakaan (*Library Research*)

Untuk memperoleh bahan dan teori yang dapat penulis gunakan untuk memecahkan masalah pembahasan, kumpulkan data dari buku, laporan, dan sumber lain yang berkaitan dengan topik pembahasan..

2. Studi Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan langsung dari penulis perusahaan sebagai subjek penelitian dan pembelajaran dan menganalisis data yang berkaitan



dengan objek menulis, sehingga data dapat dicapai dalam persiapan. Teknik penelitian lapangan diimplementasikan:

a. Kepatuhan dengan observasi langsung atau amati kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan implementasi magang.

b. Atur wawancara dengan eksekutif dan karyawan di agensi.

### 3. Metode Penyusunan

Tujuan kajian yang diamati dalam penulisan makalah dilakukan oleh penulis yang bertujuan untuk membandingkan sebuah teori selama perkuliahan, dan pada kenyataan yang ada pada lapangan untuk penyusunan laporan berdasarkan penyusunannya pada suatu lembaga.

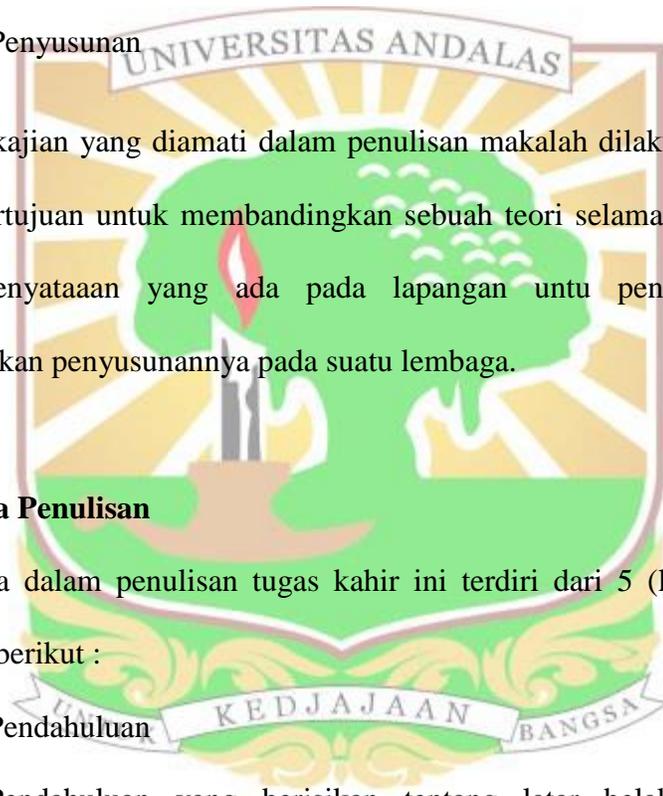
## 1.6 Sistematika Penulisan

Sisematika dalam penulisan tugas akhir ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan rincian sebagai berikut :

### Bab I           Pendahuluan

Pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, mamfaat penulisan, metode pengumpulan dan analisis data, tempat dan waktu magang, serta sistematika penulisan.

### Bab II           Landasan Teori



Landasan teori yang berhubungan dengan topik ini ialah penjelasan pengertian analisis, pengaruh, penyerpan anggaran, belanja modal serta belanja barang dan jasa.

### Bab III      Gambaran Umum KPPN Padang

Pada bab ini menjelaskan tentang hal yang berhubungan dengan KPPN Padang. Dimulai dari awal berdirinya KPPN hingga fungsi serta struktur organisasi dan manfaat instansi tersebut.

### Bab IV      Pembahasan

Pada bab ini menjelaskan laporan dari hasil kegiatan yang dilaksanakan selama magang terkait tentang “Analisis Penyerapan Anggaran Non Belanja Pegawai (Belanja Modal Dan Belanja Barang Dan Jasa) Pada Masa Pandemic Covid-19 Di KPPN Padang”.

### Bab V      Penutup

Bab ini berisi kesimpulan seluruh pembahasan serta memberikan saran yang mungkin akan berguna untuk memecahkan permasalahan yang timbul berdasarkan pengamatan penulis selama melakukan penelitian.

